

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Atmasasmita, Romli. 1996, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionalisme*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta.
- Gosita, Arif. 1993, *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Akademik Pressindo, Jakarta.
- Hasan, Iqbal M. 2002, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Hadi Sutopo, Ariesto dan Arief, Adrianus. 2010, *Terampil Mengolah Data Kualitatif Dengan NVIVO*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Komnas Perempuan. 2018, *15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengantar*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Komnas Perempuan. 2017, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Komnas Perempuan. 2017, *Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*, Komnas Perempuan, Jakarta.
- Lelono, Hari. 2003, *Tinggalan Arkeologi dalam Konteks Otonomi Daerah*, Balai Arkeologi, Yogyakarta.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Muladi. 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas
Diponegoro, Semarang.
- Mulyadi, Lilik. 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi & Viktimologi*,
Djembatan, Jakarta.
- Nevid, Jeffrey S. & Spencer A Rathus, 2003, *Psikologi Abnormal (Jilid 1)*, Erlangga,
Jakarta.
- Nursyamsi, Fajri dkk. 2015, *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: MENUJU
INDONESIA RAMAH DISABILITAS*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
Indonesia, Jakarta.
- Reksodiputro, Mardjono. 1993, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat
Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*,
Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok.
- S. Bott. 2010, *Sexual Violence and Coercion: Implications for Sexual and
Reproductive Health. In Social Determinants of Sexual and Reproductive
Health*, WHO.
- Syafi'i, M., dkk. 2016, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum, SIGAB (Sasana
Integrasi dan Advokasi Difabel)*, Yogyakarta.
- Setiono. 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program
Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Usman, Husaini, *et.al.* 2006, *Metodologi Penelitian Sosial*, PT Bumi Aksara,
Jakarta.

World Health Organization. 2002, *World Report on Violence and Health*, World Health Organization, Geneva.

B. Artikel, Jurnal, dan Hasil Penelitian

Budiarto Santoso, Meilanny dan Cipta Apsari, Nurliana. Pergeseran Paradigma dalam Disabilitas, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Padjajaran, Vol. 1, No. 2, Mei 2017.

Darmayanti, Perlindungan Hukum Terhadap Tuna Grahita Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan Pidana, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

Nur Aisah, Laili. “Penerapan Minmum Alat Bukti dalam Pembuktian Kasus Kekerasan Seksual pada Korban Penyandang Disabilitas”, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

M. Purwadi, “Penguatan Akses Hukum dan Keadilan”, *Majalah Komisi Yudisial*, Jakarta, 2018.

Maria Theresa, Penalaran Deduktif dan Induktif Siswa dalam Pemecahan Masalah Trigonometri Ditinjau dari Tingkat IQ, *Jurnal Apotema*, Vol. 1 No. 2, 2015.

Muhammad Yusuf Alfiyanto, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Anak korban Kejahatan Seksual pada Proses Peradilan”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2015.

Darmayanti, Perlindungan Hukum Terhadap Tuna Grahita Sebagai Korban Tindak Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan Pidana, *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2011.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang
Cacat, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan
Convention On The Rights of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai
Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5251.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871.

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power
Adopted by General Assembly Resolution 40/34 of 29 November 1985.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 231/PL.03.1-
Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan
Jasmani dan Rohani Serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani,
dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

D. Website

Mahkamah Agung, “Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”,

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 9 September 2018.

Fajri Nursyamsi, “Meninjau Kembali PP “Sapu Jagat”: Implementasi UU
Penyandang Disabilitas”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5982cf6388274/meninjau-kembali-pp-sapu-jagat-implementasi-uu-penyandang-disabilitas-oleh-fajri-nursyamsi>, diakses pada tanggal 12 September 2018.

Kementerian Sosial, “Bantuan Sosial Bagi Penyandang Cacat”,

<https://www.kemsos.go.id/content/bantuan-sosial-bagi-penyandang-cacat>, diakses pada tanggal 13 September 2018.

Erna Ratnaningsih, “Pergeseran Paradigma tentang Penyandang Disabilitas dalam

UU No. 8 Tahun 2016”, <http://business-law.binus.ac.id/2016/04/29/pergeseran-paradigma-tentang-penyandang-disabilitas-dalam-uu-no-8-tahun-2016/>, diakses 13 September 2018.

Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, “Mulai Tahun Ini, Pemerintah Beri

Bantuan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas”, <http://setkab.go.id/mulai-tahun-ini-pemerintah-beri-bantuan-khusus-bagi-penyandang-disabilitas-berat/>, diakses 14 September 2018.

Dinas Sosial Pemkab Bangli, “Bantuan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan

Sosial (PMKS)”, [http://disos.banglikab.go.id/index.php/baca-berita/589/BANTUAN-BAGI-PENYANDANG-MASALAH-](http://disos.banglikab.go.id/index.php/baca-berita/589/BANTUAN-BAGI-PENYANDANG-MASALAH-KESEJAHTERAAN-SOSIAL-PMKS.html)

[KESEJAHTERAAN-SOSIAL-PMKS.html](http://disos.banglikab.go.id/index.php/baca-berita/589/BANTUAN-BAGI-PENYANDANG-MASALAH-KESEJAHTERAAN-SOSIAL-PMKS.html), diakses 14 September 2018.

Tirto.id, “Pilkada 2018: Peraturan KPU Dinilai Diskriminatif Bagi Disabilitas”,

<https://tirto.id/pilkada-2018-peraturan-kpu-dinilai-diskriminatif-bagi-disabilitas-cDq8>, diakses 18 September 2018.

Hukum Online, “Pemerintah Diminta Segera Terbitkan Sejumlah PP Penyandang Disabilitas”,

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07ae0f81e00/pemerintah-diminta-segera-terbitkan-sejumlah-pp-penyandang-disabilitas>, diakses 18 September 2018.

World Health Organization, “Definition and Typology of Violence”,

<https://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/>, diakses 8 Desember 2018.